



Peran Masyarakat Peduli Api Terhadap Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Lahan Gambut di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Sri Fatimah Zahara¹, Desi Ratna Sari^{2*}, Tesa Marisa³, Jovinka Intan Aprilia⁴, Tasya⁵, Fitra Mulia⁶, Sopar⁷

^{1,2,3}Sosiologi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: sdesi9280@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 30, 2026

Accepted July 31, 2026

Available online August 31, 2026

Kata Kunci:

Masyarakat Peduli Api; Kebakaran Lahan Gambut; Pembukaan Lahan; Partisipasi Masyarakat; Pencegahan Kebakaran

Keywords:

Fire-Aware Community; Peatland Fires; Land Clearing; Community Participation; Fire Prevention..



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Kebakaran lahan gambut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai gerda terdepan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berperan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Masyarakat Peduli Api dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut di Gampong Suak Raya, Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Peduli Api memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan titik api, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan kebakaran. Namun demikian, terdapat kendala yang di hadapi , seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena

itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kerja sama antar pihak untuk mendukung efektivitas pencegahan kebakaran lahan gambut secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Peatland fires are a frequent environmental problem in West Aceh Regency and have serious impacts on community health, the environment, and economic activities. Fire prevention efforts do not solely rely on the government but also require the active involvement of the community participation is realized through the formation of the Fire Aware Community (MPA) group, which plays a role in preventing and managing peatland fires at the local level. This study aims to analyze the role of the Fire Aware Community in peatland fire prevention efforts in Suak Raya Village, West Aceh Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the Fire Aware Community outreach, monitoring hotspots, and coordinating with relevant agencies in fire prevention efforts. However several obstacles are faced, such as limited facilities and infrastructure, low awareness among some communities, and lack of coordination between stakeholders. Therefore, strengthening community capacity and increasing cooperation between parties is needed to support the effectiveness of sustainable peatland fire prevention.

1. PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ekosistem ini memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, serta sumber penghidupan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Namun, karakteristik gambut yang kaya bahan organik sekaligus mudah mengalami pengeringan menjadikan ekosistem ini sangat rentan terhadap degradasi dan kebakaran ketika mengalami perubahan tata air, pembukaan lahan, dan tekanan antropogenik. Di Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian kawasan gambut dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan, sementara praktik pengelolaan lahan tertentu masih menggunakan api sebagai metode pembukaan lahan. Dengan demikian, kebakaran gambut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan sosial, ekonomi, kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Kajian mutakhir mengenai pengelolaan kebakaran gambut di Indonesia menunjukkan bahwa degradasi akibat pengeringan, penebangan, dan perubahan penggunaan lahan meningkatkan kerentanan gambut terhadap kebakaran, sehingga strategi penanggulangan perlu mengintegrasikan dimensi ekologis dan sosial secara bersamaan (Purnomo et al., 2024).

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan yang berulang di Indonesia dengan konsekuensi yang luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, perekonomian, dan kualitas kehidupan sosial. Dampak tersebut menjadi lebih serius ketika kebakaran terjadi pada lahan gambut karena api dapat bertahan dan menjalar di lapisan organik tanah sehingga proses pemadaman menjadi lebih sulit. Selain menghasilkan asap dan menurunkan kualitas udara, kebakaran gambut juga berpotensi melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar serta mengganggu fungsi ekologis lahan. Permasalahan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusia, terutama perubahan penggunaan lahan dan praktik pembukaan lahan menggunakan api. Purnomo et al. (2024) menunjukkan bahwa tekanan antropogenik merupakan faktor penting dalam munculnya kebakaran gambut dan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam persiapan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam strategi pencegahan. Dengan demikian, pengendalian kebakaran membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi lebih menekankan pada pencegahan, perubahan perilaku, penguatan kapasitas, dan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal.

Dalam konteks masyarakat lokal, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar sering kali tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan ekonomi, kebiasaan, pengetahuan, serta persepsi masyarakat terhadap risiko kebakaran. Membakar dianggap relatif cepat, mudah, dan murah dibandingkan dengan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Pada sebagian masyarakat, praktik tersebut juga dapat bertahan karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dan diterima dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Syahza et al. (2024) menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya kebakaran gambut antara lain praktik pertanian tradisional, rendahnya biaya pembakaran, konflik kepemilikan lahan, dan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek masyarakat dan

kepentingan ekologis jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Oleh sebab itu, kebijakan pencegahan kebakaran akan sulit mencapai hasil optimal apabila hanya menekankan larangan atau penegakan aturan tanpa memahami faktor sosial dan ekonomi yang membentuk perilaku masyarakat.

Pendekatan berbasis masyarakat menjadi semakin penting karena masyarakat merupakan aktor yang paling dekat dengan sumber daya dan lingkungan tempat mereka hidup. Keterlibatan masyarakat memungkinkan proses pencegahan dilakukan melalui pengetahuan lokal, pengawasan langsung, komunikasi antarwarga, deteksi dini, serta tindakan kolektif ketika muncul potensi kebakaran. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki posisi strategis sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. MPA tidak hanya berperan dalam membantu pemadaman, tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosialisasi, edukasi, pemantauan titik rawan, pelaporan dini, dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Nurhidayah et al. (2023) menempatkan MPA sebagai aktor penting dalam pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat dan restorasi gambut di tingkat lokal. Sementara itu, Syahza et al. (2024) menunjukkan bahwa edukasi masyarakat yang melibatkan MPA dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, bimbingan teknis, sosialisasi, kampanye, forum diskusi, media sosial, dan kegiatan restorasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Meskipun demikian, keberadaan kelompok masyarakat saja belum menjamin efektivitas pencegahan kebakaran. Efektivitas MPA sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggota, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat, kualitas komunikasi, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Purnomo et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan berbasis masyarakat dipengaruhi oleh kombinasi antara partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, modal sosial, kelembagaan lokal, dukungan politik, dan keberlanjutan mata pencaharian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan kebakaran tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi membutuhkan penguatan kelembagaan dan tindakan kolektif yang memungkinkan masyarakat menjadi subjek dalam pengelolaan risiko kebakaran. Bahkan, kajian terbaru mengenai pengelolaan kebakaran gambut di Indonesia menunjukkan bahwa strategi yang lebih berkelanjutan cenderung menggabungkan intervensi teknis, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi multipihak dalam suatu tata kelola yang adaptif (Purnomo et al., 2024).

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks Kabupaten Aceh Barat, khususnya Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, yang memiliki kawasan lahan gambut dan menghadapi potensi kebakaran serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan kondisi lapangan yang menjadi dasar penelitian ini, praktik pembakaran masih ditemukan karena dipandang lebih praktis dan ekonomis, sementara upaya pencegahan menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya koordinasi, serta belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebakaran di tingkat lokal bukan hanya berkaitan dengan keberadaan api, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat memahami risiko, bagaimana norma dan kebiasaan terbentuk, bagaimana komunikasi antarpihak

berlangsung, serta sejauh mana kelompok masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan pencegahan secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya partisipasi masyarakat, edukasi, dan kelembagaan lokal dalam pencegahan kebakaran gambut. Namun, masih diperlukan kajian yang secara kontekstual melihat bagaimana MPA menjalankan perannya dalam menghadapi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar pada tingkat komunitas lokal, sekaligus mengidentifikasi kendala sosial, ekonomi, kelembagaan, dan komunikasi yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Pendekatan semacam ini penting karena efektivitas pencegahan kebakaran sangat bergantung pada karakteristik sosial dan ekologis masing-masing wilayah. Studi berbasis partisipasi di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan perilaku menuju pengelolaan lahan tanpa bakar membutuhkan proses pembelajaran bersama, kepemimpinan masyarakat, modal sosial, kelembagaan lokal, dan dukungan pemangku kepentingan yang berkelanjutan (Purnomo et al., 2024). Dengan demikian, penelitian pada tingkat gampong dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara praktik pembukaan lahan, partisipasi masyarakat, peran MPA, edukasi, serta koordinasi dalam pencegahan kebakaran gambut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Masyarakat Peduli Api dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar lahan gambut di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian secara khusus mengkaji praktik pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat, bentuk dan strategi peran MPA dalam pencegahan kebakaran, kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut, serta pentingnya edukasi, partisipasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat upaya pencegahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan pendekatan pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat, khususnya melalui penguatan kapasitas MPA, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan komunikasi risiko yang partisipatif, dan penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar serta peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut. Penelitian dilaksanakan pada Mei 2026 di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Informan dipilih secara purposive, meliputi anggota MPA, aparat gampong, tokoh masyarakat, serta warga yang mengetahui atau pernah terlibat dalam pembukaan lahan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sedangkan observasi digunakan untuk melihat kondisi lingkungan dan aktivitas pencegahan kebakaran secara langsung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta pengecekan kembali informasi kepada informan (*member checking*) (Creswell, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Praktik Pembukaan Lahan Oleh Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih ditemukan di Gampong Suak Raya. Informan menjelaskan bahwa metode tersebut masih dipilih karena dianggap lebih cepat, mudah, dan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pembukaan lahan tanpa membakar. Selain itu, kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun juga menjadi alasan masyarakat masih mempertahankan praktik tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan, dan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai dampak kebakaran lahan gambut. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Fadila dkk. (2026) yang menyatakan bahwa aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat

Menurut teori perilaku lingkungan, perilaku masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola lahan perlu didukung melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga kelestarian lahan gambut.



Gambar 1. Kondisi Lahan Gambut di Gampong Suak Raya , Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2026

Peran Masyarakat Peduli Api (MPA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Peduli Api (MPA) mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Gampong Suak Raya. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di kawasan rawan kebakaran, pemantauan titik api, pelaporan dini apabila ditemukan potensi kebakaran, hingga membantu proses pemadaman pada tahap awal sebelum bantuan dari instansi terkait datang ke lokasi. Selain itu, MPA juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan program pencegahan kebakaran.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat dari Keith Davis, partisipasi merupakan keterlibatan mental, emosional, dan fisik masyarakat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan MPA menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan, melainkan menjadi subjek yang ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Sopar dkk. yang menjelaskan bahwa kelompok Masyarakat Peduli Api memiliki peran aktif dalam melakukan koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan titik api, meningkatkan kepedulian masyarakat, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut sebagai sumber kehidupan masyarakat

Selain itu, berdasarkan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, keberhasilan suatu komunitas dalam menyelesaikan masalah bersama dipengaruhi oleh adanya kepercayaan, kerja sama, dan jaringan sosial. Dalam penelitian ini, keberadaan MPA menunjukkan adanya modal sosial yang mampu memperkuat kerja sama masyarakat dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut.

Dengan demikian, keberadaan MPA tidak hanya berfungsi sebagai kelompok relawan pemadam kebakaran, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kendala Dalam Pelaksanaan Peran MPA

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pelaksanaan tugas MPA masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya peralatan pemadaman, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan kebakaran belum berjalan secara maksimal.

Jika dianalisis menggunakan teori komunikasi risiko, keberhasilan pengendalian kebakaran sangat bergantung pada komunikasi yang bersifat partisipatif, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang hanya bersifat satu arah menyebabkan masyarakat hanya menerima informasi tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian Fadila dkk. menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pencegahan karhutla. Perbedaan persepsi, lemahnya koordinasi, serta komunikasi yang belum

berkelanjutan menyebabkan efektivitas pencegahan kebakaran menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota MPA melalui pelatihan secara berkala, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan kebakaran dapat berjalan lebih

Peran Masyarakat Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran lahan gambut. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan MPA, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai penyebab kebakaran, dampak kebakaran terhadap kesehatan dan lingkungan, serta cara membuka lahan tanpa membakar.

Menurut teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife, masyarakat akan mampu menyelesaikan permasalahannya apabila diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat instruksi dari pemerintah.

Penelitian mengenai edukasi partisipatif di Aceh Barat juga menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan, pelatihan, simulasi, dan pembentukan tim siaga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebakaran gambut, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mendorong terbentuknya aksi kolektif dalam menjaga lingkungan

Dengan demikian, edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat sehingga upaya pencegahan kebakaran lahan gambut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau MPA, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Gampong Suak Raya..

Pentingnya Komunikasi Kerja Sama Antar Pihak

Upaya pencegahan kebakaran tidak dapat dilakukan secara sendiri – sendiri. Diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun kesadaran bersama (Aristyavani, 2021). Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka informasi terkait risiko kebakaran dapat dipahami dengan lebih jelas oleh masyarakat. Namun, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi perbedaan pemahaman yang dapat menghambat upaya pencegahan.

Pembahasan

Praktik Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar sebagai Persoalan Sosial-Ekologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih ditemukan di Gampong Suak Raya. Berdasarkan keterangan informan, pembakaran dipandang sebagai cara yang lebih cepat, mudah, dan relatif murah dibandingkan dengan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Selain pertimbangan ekonomi, keberlanjutan praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pembakaran tidak semata-mata dapat dipahami

sebagai tindakan yang berorientasi pada eksploitasi lingkungan, tetapi merupakan perilaku yang terbentuk melalui interaksi antara kebutuhan ekonomi, kebiasaan sosial, pengetahuan, dan persepsi masyarakat terhadap risiko.

Temuan tersebut sejalan dengan Asmit et al. (2024) yang menunjukkan bahwa praktik pembakaran lahan gambut dapat dipengaruhi oleh praktik pertanian tradisional, biaya pembukaan lahan yang rendah, konflik kepemilikan lahan, serta meningkatnya kebutuhan terhadap lahan pertanian. Dengan demikian, larangan pembakaran saja belum tentu cukup untuk mengubah perilaku masyarakat apabila tidak disertai dengan alternatif pembukaan lahan yang secara ekonomi dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian tersebut juga menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pencegahan melalui edukasi, bimbingan teknis, komunikasi langsung, kampanye, dan kegiatan restorasi.

Dalam perspektif perilaku lingkungan, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan mengenai risiko lingkungan dan keputusan praktis masyarakat dalam mengelola lahan. Masyarakat dapat memahami bahwa pembakaran memiliki risiko terhadap lingkungan, tetapi tetap memilih metode tersebut apabila manfaat jangka pendek—seperti efisiensi waktu dan biaya—dipersepsikan lebih besar daripada risiko jangka panjang. Oleh karena itu, perubahan perilaku membutuhkan proses edukasi yang tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai bahaya kebakaran, tetapi juga memberikan pilihan teknologi, keterampilan, dan mekanisme pengelolaan lahan yang realistis.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks pada ekosistem gambut. Kebakaran pada gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran pada vegetasi permukaan karena api dapat menjalar pada lapisan organik dan sulit dideteksi maupun dipadamkan secara cepat. Nurhidayah et al. (2023) menjelaskan bahwa kebakaran di Indonesia banyak berkaitan dengan gangguan antropogenik, termasuk pembukaan lahan dan pengeringan gambut untuk kegiatan pertanian. Karena itu, pencegahan perlu diarahkan pada sumber risikonya, termasuk perubahan praktik pembukaan lahan dan penguatan kapasitas komunitas.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan persoalan sosial-ekologis. Artinya, solusi tidak cukup hanya berupa pendekatan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi harus mencakup perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, penyediaan alternatif pengelolaan lahan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Pendekatan tersebut lebih memungkinkan terciptanya perubahan yang berkelanjutan karena menyentuh faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan praktik pembakaran.

Masyarakat Peduli Api sebagai Aktor Utama Pencegahan Kebakaran Berbasis Komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran strategis dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di Gampong Suak Raya. Peran tersebut diwujudkan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli kawasan rawan kebakaran, pemantauan titik api, pelaporan dini, serta keterlibatan dalam penanganan awal ketika kebakaran terjadi. MPA juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program pencegahan kebakaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa MPA bukan sekadar kelompok yang bertugas membantu pemadaman, tetapi merupakan institusi sosial yang

menjalankan fungsi pencegahan, komunikasi, pengawasan, dan mobilisasi masyarakat.

Temuan tersebut konsisten dengan Nurhidayah et al. (2023), yang menempatkan MPA sebagai aktor terdepan dalam pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat dan restorasi gambut pada tingkat lokal. Dalam pendekatan *community-based fire management*, masyarakat tidak ditempatkan sebagai penerima kebijakan semata, tetapi sebagai bagian dari sistem pengelolaan risiko. MPA memiliki keunggulan karena berada dekat dengan wilayah rawan, memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungan, dan dapat merespons indikasi kebakaran lebih cepat dibandingkan aktor eksternal.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat, keterlibatan MPA menunjukkan adanya pergeseran posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pengelolaan lingkungan. Masyarakat tidak hanya menerima instruksi mengenai larangan membakar, tetapi ikut melakukan pemantauan, sosialisasi, pelaporan, dan respons awal. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa partisipasi akan lebih bermakna ketika masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan di tingkat lokal.

Peran MPA juga dapat dijelaskan melalui perspektif modal sosial Putnam, terutama dalam aspek kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kerja sama. Pencegahan kebakaran pada tingkat gampong membutuhkan tindakan kolektif karena risiko kebakaran tidak berhenti pada batas kepemilikan lahan. Api yang berasal dari satu lokasi dapat menyebar ke wilayah lain dan menimbulkan dampak bersama. Karena itu, kemampuan masyarakat untuk saling berkomunikasi, mempercayai informasi, melakukan pengawasan, dan bertindak secara kolektif menjadi modal penting dalam mengurangi risiko kebakaran.

Purnomo et al. (2024) memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran berbasis masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, modal sosial, dan kelembagaan lokal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat mendorong perubahan perilaku dan tindakan kolektif, tetapi penguatan kelembagaan tetap diperlukan agar perubahan tidak berhenti ketika suatu program atau intervensi berakhir.

Dengan demikian, MPA di Gampong Suak Raya dapat dipahami sebagai bentuk kelembagaan lokal yang memiliki potensi besar dalam membangun sistem pencegahan kebakaran berbasis komunitas. Namun, potensi tersebut hanya akan menghasilkan dampak yang optimal apabila didukung oleh sumber daya, pelatihan, sarana, legitimasi kelembagaan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterbatasan Sarana, Kapasitas, dan Koordinasi sebagai Penghambat Efektivitas MPA

Meskipun MPA memiliki peran penting, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan tugas masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya peralatan pemadaman, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab yang

diberikan kepada komunitas dan kapasitas yang tersedia untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan Nurhidayah et al. (2023), yang menemukan bahwa MPA di sejumlah wilayah Indonesia menghadapi keterbatasan dukungan finansial untuk operasional dan pemeliharaan, sementara tidak tersedianya teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang terjangkau juga menjadi hambatan dalam mengurangi kejadian kebakaran. Studi tersebut menekankan bahwa penguatan pendanaan dan dukungan kelembagaan diperlukan agar pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat dapat berjalan secara efektif.

Keterbatasan sarana tidak hanya berdampak terhadap kemampuan MPA dalam melakukan pemadaman, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan kegiatan pencegahan. Patroli, pemantauan, pelaporan, dan kegiatan edukasi membutuhkan dukungan logistik dan fasilitas. Apabila kelompok masyarakat diberikan tanggung jawab besar tetapi tidak disertai fasilitas yang memadai, maka keberadaan MPA berisiko menjadi simbol kelembagaan tanpa kapasitas operasional yang kuat.

Selain persoalan sumber daya, koordinasi antarpihak menjadi faktor penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat, MPA, dan pemerintah belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut relevan dengan penelitian Fadila et al. (2026) mengenai komunikasi risiko di Kabupaten Aceh Barat yang menemukan bahwa komunikasi pencegahan karhutla telah berlangsung melalui berbagai saluran, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kesepahaman bersama antaraktor. Perbedaan pemaknaan risiko, keterbatasan koordinasi, dan ketimpangan peran antarpemangku kepentingan menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas pencegahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MPA tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan kelompok melakukan patroli atau pemadaman awal. Efektivitasnya harus dilihat dalam kerangka tata kelola kolaboratif, yaitu sejauh mana masyarakat, pemerintah gampong, instansi kehutanan, BPBD, Manggala Agni, dan aktor lainnya memiliki pembagian peran yang jelas serta mekanisme komunikasi dan respons yang terintegrasi. Dengan kata lain, MPA perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran.

Edukasi dan Pemberdayaan sebagai Instrumen Perubahan Perilaku

Penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan MPA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi mencakup penyampaian informasi mengenai penyebab kebakaran, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, serta alternatif pembukaan lahan tanpa membakar. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat mulai memperoleh pemahaman bahwa kebakaran gambut tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Temuan ini mendapatkan dukungan kuat dari Asmit et al. (2024), yang mengembangkan model edukasi masyarakat untuk pencegahan kebakaran gambut. Studi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dapat dilakukan melalui pendekatan individual dan kelompok, termasuk komunikasi langsung, bimbingan teknis, sosialisasi, kampanye, forum diskusi, media sosial, serta kegiatan restorasi. Dengan demikian, edukasi pencegahan kebakaran akan lebih efektif apabila

dikembangkan sebagai proses komunikasi dua arah dan pemberdayaan, bukan sekadar penyampaian larangan.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, edukasi menjadi penting karena perubahan perilaku tidak dapat dipaksakan hanya melalui regulasi. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kebijakan, memiliki kemampuan untuk menerapkan alternatif yang tersedia, serta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Purnomo et al. (2024) bahwa perubahan menuju praktik pengelolaan lahan tanpa bakar membutuhkan partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, modal sosial, kelembagaan lokal, dan dukungan politik.

Temuan di Aceh Barat juga memperlihatkan bahwa edukasi partisipatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyebab kebakaran serta mendorong terbentuknya inisiatif lokal berupa tim siaga api dan sistem pelaporan dini (Amir et al., 2025). Hal tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi pintu masuk bagi terbentuknya kesadaran kolektif dan tindakan bersama.

Namun demikian, edukasi perlu dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi dan teknologi. Apabila masyarakat memahami bahaya pembakaran tetapi tidak memiliki alternatif yang murah dan mudah untuk mengolah lahan, maka perubahan perilaku akan sulit dipertahankan. Oleh sebab itu, edukasi sebaiknya diarahkan pada *behavioral change* yang disertai dukungan teknis, alternatif pembukaan lahan, dan insentif yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembakaran.

Komunikasi Risiko dan Kolaborasi Multipihak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran tidak dapat dilakukan oleh MPA secara sendiri. Diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Komunikasi yang efektif menjadi dasar untuk memastikan bahwa informasi mengenai risiko kebakaran dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti secara tepat.

Dalam konteks ini, komunikasi risiko tidak seharusnya dipahami sebagai proses penyampaian informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi risiko yang efektif membutuhkan interaksi, pertukaran pengalaman, negosiasi pemahaman, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Penelitian Fadila et al. (2026) di Aceh Barat menunjukkan bahwa perbedaan pemaknaan risiko dan keterbatasan koordinasi dapat menghambat pencegahan karhutla. Karena itu, penguatan komunikasi yang partisipatif, interaktif, dan berorientasi pada pencegahan menjadi kebutuhan penting.

Dari perspektif tata kelola, kondisi tersebut mengarah pada kebutuhan untuk membangun sistem kolaborasi yang lebih terstruktur. MPA dapat berperan sebagai penghubung tingkat tapak, pemerintah menyediakan dukungan kebijakan dan sumber daya, instansi teknis memberikan pelatihan dan dukungan operasional, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam pengawasan dan perubahan perilaku. Pola tersebut memungkinkan pencegahan dilakukan secara berlapis, mulai dari perubahan perilaku individu hingga penguatan kelembagaan komunitas.

Purnomo et al. (2024) menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan ketika terdapat dukungan politik, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, modal sosial, kelembagaan lokal, dan model mata pencaharian yang mendukung transisi menuju praktik tanpa bakar. Oleh karena itu, penguatan MPA tidak cukup dilakukan melalui pembentukan kelompok, tetapi harus diikuti dengan pembangunan ekosistem kelembagaan yang memungkinkan kelompok tersebut berfungsi secara berkelanjutan.

Sintesis Pembahasan: Menuju Model Pencegahan Kebakaran Berbasis Komunitas

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar di Gampong Suak Raya merupakan persoalan yang dibentuk oleh interaksi antara faktor ekonomi, kebiasaan, pengetahuan, persepsi risiko, kapasitas kelembagaan, dan kualitas koordinasi. MPA telah menjalankan fungsi penting melalui sosialisasi, patroli, pemantauan, pelaporan, dan respons awal, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sarana, kapasitas, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarpihak.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi pencegahan yang paling relevan bukanlah pendekatan yang hanya berorientasi pada pemadaman, melainkan pencegahan berbasis komunitas yang mengintegrasikan edukasi, perubahan perilaku, penguatan MPA, komunikasi risiko, teknologi atau alternatif pembukaan lahan, dan kolaborasi multipihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Purnomo et al. (2024) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, modal sosial, kelembagaan, dukungan politik, dan keberlanjutan mata pencaharian dalam pencegahan kebakaran dan restorasi gambut.

Oleh karena itu, penguatan MPA di Gampong Suak Raya perlu diarahkan pada tiga dimensi utama. Pertama, penguatan kapasitas, melalui pelatihan, simulasi, peningkatan keterampilan deteksi dini, dan penyediaan peralatan yang memadai. Kedua, penguatan partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat, melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan alternatif pembukaan lahan yang lebih aman dan terjangkau. Ketiga, penguatan tata kelola dan komunikasi multipihak, melalui mekanisme koordinasi yang jelas antara masyarakat, MPA, pemerintah gampong, dan instansi terkait. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan apabila pencegahan kebakaran lahan gambut ingin menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa MPA dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan ekologis pada tingkat komunitas, bukan hanya sebagai kelompok respons ketika kebakaran terjadi. Peran tersebut menjadi semakin penting apabila MPA didukung oleh edukasi partisipatif, modal sosial, fasilitas yang memadai, komunikasi risiko yang efektif, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pencegahan kebakaran lahan gambut pada tingkat lokal sangat ditentukan oleh kemampuan menghubungkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tujuan perlindungan lingkungan secara partisipatif dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan gambut di Gampong Suak Raya melalui sosialisasi, patroli, pemantauan titik api, dan keterlibatan dalam pemadaman awal. Namun, peran tersebut belum optimal karena masih ditemukan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta koordinasi antarpihak yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas MPA, edukasi masyarakat secara berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan pencegahan kebakaran lahan gambut yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Diperlukan penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara MPA, pemerintah gampong, masyarakat, dan instansi terkait perlu ditingkatkan agar upaya pencegahan kebakaran lahan gambut dapat dilakukan secara partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Idris, F., Safriani, M., Maifizar, A., Fazlina, R., Veranita, V., & Supardi, J. (2025). Penguatan Kapasitas Untuk Mitigasi Kebakaran Laha Gambut Melalui Edukasi Partisipatif di Aceh Barat. *Jurnal Cendekia*.
- Aristyavni. (2021). Komunikasi Risiko dalam Penanggulangan Bencana.
- BPS Aceh Barat. (2024). Kabupaten Aceh Barat dalam Angka
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif , kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fadila, I., Sadono, D., & Utami, A. (2026). Komunikasi Risiko sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Barat. *Future Academia*.
- Legionosuko, ddk. (2019). *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*.
- Maulida, ddk. (2021). *Pendekatan Partisipasif dalam Mitigasi Bencana*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Najiyati, ddk. (2005). *Panduan Pengelolaan Ekosistem Gambut*.
- Nurdin, ddk. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Bencana*.
- Rasyid. (2014). *Dampak Kebakaran Hutam terhadap Lingkungan dan Masyarakat*.
- Sopar, S., Tjoetra, A., & Yulianda, R. (2022). *Peran Perempuan dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Gampong Suak Raya Kabupaten Aceh Barat*.
- Sugiyono. (2014). *Metode penilitian kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suryani, ddk. (2021). *Edukasi Lingkungan dalam Pencegahan Karhutla*.
- Virmanto. (2022). *Ekosistem Gambut dan Perubahan Iklim*.
- Wahyu, ddk. (2005). *Karakteristik dan Pengelolaan Ekosistem Gambut*.
- Wahyudi, ddk. (2023). *Karakteristik Lahan Gambut di Aceh Barat*